

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya, serta keinginan untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, hingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga dapat terwujud *good governance* yang diharapkan. Untuk itu pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sehubungan dengan hal itu, maka dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKiIP) Tahun 2022.

LKjIP ini tersusun berkat kerja keras dari semua pihak yang terlibat dalam pengumpulan data dan informasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas. Namun kami menyadari akan adanya segala kekurangan dalam menyusun LKjIP ini, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat guna peningkatan kualitas yang lebih baik pada penyusunan yang akan datang. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Purwokerto, Januari 2023

KEPALA DINAS

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS

> TITIK PUJASTUTI, SH, M.Pd Pembina Utama Muda

P. 19640402 199103 2 005

DAFTAR ISI

			Halamar
HALAM	ΑN	JUDUL	i
KATA P	EN	GANTAR	ii
DAFTAI	R IS	SI	iv
IKHTIS/	٩R	EKSEKUTIF	V
BAB I	PE	NDAHULUAN	1
	A.	Latar Belakang	1
	В.	Landasan Hukum	2
	C.	Tujuan	3
	D.	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD serta Struktur	
		Organisasi	3
	E.	Kondisi Kepegawaian dan Sarana Prasarana	7
	F.	Permasalahan dan Isu-isu Strategis	9
BAB II	PE	ERENCANAAN KINERJA	11
	A.	Rencana Strategis	11
		1. Visi dan Misi	11
		2. Tujuan	12
		3. Sasaran	12
	В.	Indikator Kinerja Utama	12
	C.	Perjanjian Kinerja	13
	D.	Rencana Anggaran Tahun 2022	14
BAB III	Αŀ	KUNTABILITAS KINERJA	15
	A.	Capaian Kinerja Organisasi	17
	В.	Realisasi Anggaran	40
BAB IV	Pl	ENUTUP	42
LAMPIF	RAN	I:	
	1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
	2.	Dokumentasi Penghargaan Tahun 2022	
	3.	Pengukuran Kinerja Tahun 2022	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kinerja Tahunan yang dtetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022. Penyusunan LKjIP Tahun 2022 pada hakekatnya adalah upaya untuk memberikan penjelasan akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022.

Visi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas mengacu Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yaitu "Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri", dalam mendukung visi tersebut, dijabarkan menjadi 8 (delapan) misi atau yang dikenal Hasta Krida, yaitu:

- 1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik.
- 2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
- 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.
- 4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan.
- 5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.
- 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.
- 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya local.
- 8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih terfokus pada misi ke-3 yaitu "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan" dengan tujuan "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian" pada sasaran "Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan, perdagangan dan jasa".

Agar visi dan misi tersebut lebih mudah diimplementasikan maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Keberhasilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dalam mencapai tujuan dan sasaran diukur melalui capaian indikator kinerja.

Capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas tahun 2022 direprentasikan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	24,33%	25,56%	
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	15,24%	15.50%	

^{* =} Data dari BPS tahun 2021, data tahun 2022 belum dirilis

Dengan capaian kinerja rata-rata di atas target yang telah ditentukan, maka capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 masuk dalam kategori sangat tinggi. Melalui LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas tahun 2022 ini, diharapkan bisa menjadi bahan perbaikan bagi pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2022 mendatang sesuai dengan rencana dan sasaran strategis daerah.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas lahir pada tanggal 6 September 2016 didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, sedangkan tugas dan fungsinya tertuang dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 103 Tahun 2021. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Bupati Banyumas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, serta sebagai

salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Peraturan Pemerintah
 Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
 Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,
 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
 Pembangunan Daerah;
- e. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas selama Tahun 2022.

Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. Kedudukan, Tugas dan Fungsi SKPD serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 103 Tahun 2021, maka Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang pasar, dan bidang metrologi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

2. Fungsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang pasar, dan bidang metrologi;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang pasar, dan bidang metrologi;
- c. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang pasar, dan bidang metrologi;

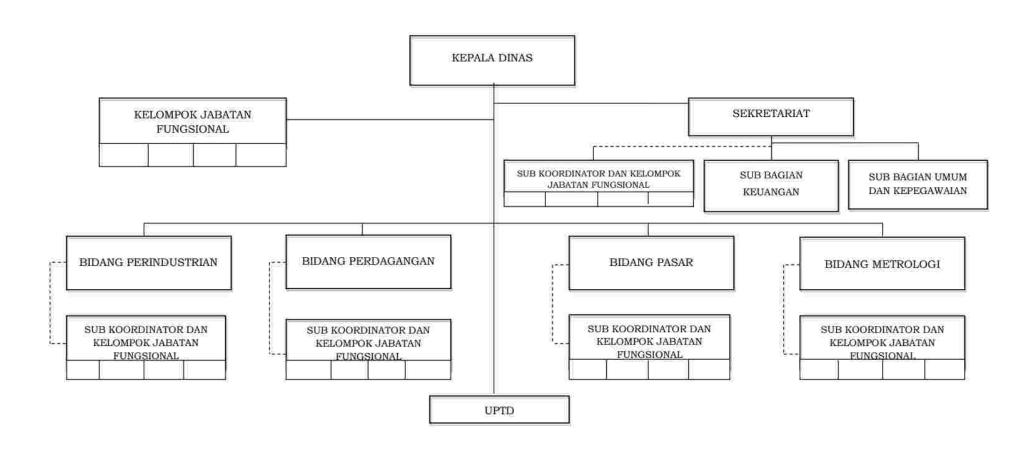
- d. pelaksanaan administrasi kedinasan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Bina Usaha Industri;
 - 2. Sub Koordinator Fasilitasi dan Informasi Industri;
 - 3. Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Industri.
- d. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
 - Sub Koordinator Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perdagangan;
 - 2. Sub Koordinator Informasi dan Promosi Dagang.
- e. Bidang Pasar, terdiri dari:
 - Sub Koordinator Sarana dan Prasarana, Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar:
 - 2. Sub Koordinator Administrasi, Keuangan dan Pengembangan SDM Pasar;
 - 3. Sub Koordinator Pembinaan dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima.
- f. Bidang Metrologi, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator Penyuluhan dan Pengawasan;
 - 2. Sub Koordinator Pelayanan Tera / Tera Ulang.
- g. Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari :
 - 1. UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I;
 - 2. UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II;
 - 3. UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur;
 - 4. UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS



E. Kondisi Kepegawaian dan Sarana Prasarana

Dinperindag Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 440 orang yang terdiri dari 203 PNS, 1 PTT dan 236 THL. Pegawai tersebut apabila dilihat dari tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

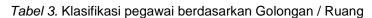
Tabel 1. Klasifikasi pegawai berdasarkan pendidikan

NO	TINGKAT		PEGAWAI					
NO	PENDIDIKAN	PNS	PTT	THL	JUMLAH			
1.	PASCA SARJANA/S2	9	-	-	9			
2.	SARJANA/S1	37	-	34	71			
3.	DIPLOMA III	10	-	16	26			
4.	SLTA	71	-	135	206			
5.	SLTP	48	-	30	78			
6.	SD	28	1	21	50			
Jumlah		203	1	236	440			

Data tersebut menunjukan bahwa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas didominasi oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan SLTA atau 46,82%.

Tabel 2. Klasifikasi pegawai berdasarkan jenis kelamin

NO	JENIS KELAMIN		JUMLAH		
		PNS	PTT	THL	
1.	Laki – laki	141	-	190	331
2.	Perempuan	62	1	46	109
Jumlah		203	1	236	440



	BIDANG						GO	LON	GAN	/RU	JAN	G						
NO		I				II		III			IV				JML			
		а	b	С	d	а	b	С	d	а	b	С	d	а	b	С	d	ı
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	ı	-	-	-	ı	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	-	-	2	1	3	1	7	1	1	-	3	-	1	-	-	20
3	Perindustrian	-	-	-	-	ı	-	-	3	8	-	1	4	1	-	-	-	17
4	Perdagangan	-	-	-	-	ı	-	2	1	2	1	1	-	2	-	-		9
5	Pasar	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	-	2	1	-	-		9
6	Metrologi	-	-	-	3	-	1	-	1	3	1	-	9	-	-	-	-	18
7	UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I	-	-	2	6	2	3	1	8	-	1	-	1	-	-	-	-	24
8	UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II	-	-	-	8	-	5	3	4	1	1	-	2	-	-	-	-	24
9	UPTD Pasar Wilayah Timur	-	-	-	4	3	8	4	3	1	2	1	-	•	-	-	-	25
10	UPTD Pasar Wilayah Barat	-	-	1	13	7	14	4	15	-	-	-	2	-	-	-	-	56
	JUMLAH	0	0	3	36	13	36	15	43	17	8	3	23	4	1	1	0	203

Kondisi Sarana Prasarana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 secara umum cukup memadai. Berikut ini data sarana dan prasarana penunjang Dinperindag Kabupaten Banyumas :

Tabel 4. Data sarana penunjang operasional kantor

NO	JENIS SARANA	JUMLAH
1.	Mobil	12
2.	Sepeda Motor	29
3.	Kamera Digital	6
4.	LCD Proyektor	12
5.	Komputer	57
6.	Laptop	68
7.	Printer	124
8.	Mesin Ketik	47
9.	НТТ	17
10.	HP / Tablet	12

F. Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan serta antara kondisi yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan. Secara garis besar permasalahan-permasalahan pembangunan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dapat dirumuskan sebagai berikut ini:

- 1. Kurangnya pengembangan industri pengolahan;
- 2. Kurangnya perencanaan dan pembangunan industri;
- 3. Kurang tersedianya sarana dan prasarana produksi;
- 4. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan izin usaha industri;
- 5. Kurang maksimalnya sinkronisasi sistem industri;
- 6. Kurangnya kualitas produk sesuai dengan standar ekspor;
- 7. Kurang optimalnya standarisasi dan perlindungan konsumen;
- 8. Kurangnya kompetensi pelaku usaha produksi produk potensial daerah;
- 9. Kurang maksimalnya promosi pemanfaatan produk dalam negeri;
- 10. Kurangnya keterjangkauan harga pangan;
- 11. Kurang terkendalinya stabilisasi harga pangan;
- 12. Terbatasnya stok barang;
- 13. Kurang meratanya distribusi pangan;
- 14. Kurangnya kualitas sarana distribusi perdagangan;
- 15. Kurang tersedianya sarana dan prasarana PKL;
- 16. Kurangnya pemeliaharaan dan revitalisasi Pasar Rakyat.

Sedangkan untuk Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah dan masyarakat di masa datang. Suatu kondisi menjadi isu strategis jika kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang jika tidak dimanfaatkan, adapun isu-isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

- Pengembangan Industri yang Berdaya Saing.
 Pengembangan industri diharapkan akan mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja pada masa mendatang.
- 2. Pengembangan Usaha Perdagangan.

Pengembangan usaha perdagangan merupakan suatu upaya untuk mengatasi keterbatasan pelaku usaha dalam mengakses informasi pasar, keterbatasan jangkauan pasar, keterbatasan jejaring kerja dan keterbatasan mengakses lokasi usaha yang strategis.

- 3. Pengembangan Pasar dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima.
 Pengembangan Pasar dan Pengendalian PKL merupakan suatu cara mengembangkan kelompok pelaku usaha dengan karakteristik berpenghasilan rendah, bergerak di sektor formal dan informal terutama disektor perdagangan di pasar dan pedagang kaki lima.
- Penerapan Metrololgi yang Tepat.
 Penerapan metrologi yang tepat dapat memecahkan permasalahan perdagangan yang ada dan mencegah timbulnya masalah perdagangan karena hambatan teknis perdagangan.

II. PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI DAN MISI KABUPATEN BANYUMAS

Visi Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 adalah :

"Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri"

Dalam mendukung visi tersebut, dijabarkan menjadi 8 (delapan) misi atau yang dikenal Hasta Krida, yaitu:

- 1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik.
- 2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
- 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.
- 4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan.
- 5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.
- 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.
- 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal.
- 8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Dalam pencapaian misi Kabupaten Banyumas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas merupakan pendukung pencapaian misi ke-3, yaitu "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan" dengan tujuan "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian" pada sasaran "Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan, perdagangan dan jasa".

2. TUJUAN

Dalam mewujudkan target dalam Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA Perubahan) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2023, perlu adanya tujuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas sebagai dasar dalam ketercapaian target dimaksud. Adapun tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

"Meningkatnya Pertumbuhan Industri Pengolahan, Perdagangan dan Jasa"

Tujuan tersebut memiliki 2 (dua) indikator yaitu:

- 1. Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB; dan
- 2. Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

3. SASARAN

Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian, dengan 1 (satu) indikator yaitu Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB.
- Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan, dengan 1 (satu) indikator yaitu Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Nomor 050 / 2045 / 2021 Tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 – 2023. Adapun Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

Tabel 5. IKU Dinperindag Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023.

No	Tujuan	Indikator Tujuan / Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Pengolahan, Perdagangan dan Jasa.	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB
		Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja merupakan tekad atau janji kinerja tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Dinperindag Kabupaten Banyumas Tahun 2022.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Pengolahan,	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	24,33%
	Perdagangan dan Jasa	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	15,24%

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (APBD) Tahun 2022 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022, dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021, adapun untuk perubahan anggaran di tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022, dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.

Adapun komposisi belanja untuk masing-masing sasaran strategis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Rer	ncana Anggaran
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Rp.	923,294,000
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Rp.	15,878,182,544
	TOTAL	Rp.	16,801,476,544

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kepada pihak yang memiliki hak atau berwewenang meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran tentang tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang diterapkan. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pemerintah Kabupaten Banyumas selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masingmasing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023, Renstra Perubahan 2021-2023, RKT Tahun 2022, Renja Tahun 2022, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan dan membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan

dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam RENSTRA. Setelah dilakukan pengukuran kinerja dapat diketahui selisih atau celah kinerja. Berdasarkan selisih tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam Renstra.

Evaluasi dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan LKjIP ini menggunakan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tabel 8. Skala Nilai Peringkat Kinerja.

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Peremendagri No 86 Tahun 2017

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan dan program. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor 050 / 1425 / 2019 Tahun 2019 tanggal 23 April 2019 yang telah diubah dalam Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Nomor 050 / 2045 / 2021 Tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 – 2023. Hasil pengukuran atas indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian indikator kinerja Tahun 2022 Dinperindag Kab. Banyumas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	24,33%	25,56%	105,06%
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	15,24%	15.50%	101,71%

^{* =} Data dari BPS Tahun 2021, Data Tahun 2022 belum dirilis

Rata-rata capaian indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas tahun 2022 adalah sebesar 103,39% atau melebihi target (dengan penilaian kinerja sangat tinggi).

Adapun pencapaian kinerja pada setiap indikator kinerja berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 10. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinperindag Kabupaten Banyumas Tahun 2022

				≤ 50%	51% ≤	66% ≤	76%	91% ≤
	Sasaran	Indikator	Capaian		65%	75%	≤	100%
No			Kinerja				90%	
	Strategis	Kinerja	Sasaran	Sangat				Sangat
				Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	105,06%					Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	101,71%					Sangat Tinggi

a) Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Tahun 2021-2023 maupun Renja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator dengan rincian berikut:

Tabel 11. Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Predikat
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	1 indikator	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	1 indikator	Sangat Tinggi

Secara umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja 2022. Hal tersebut dapat dilihat dalam analisis capaian dari masing-masing sasaran sebagai berikut:

SASARAN 1: Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian

Sektor Industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor Industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang signifikan. Peranan Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi Nasional dapat ditelusuri dari kontribusi masing-masing subsektor terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional atau terhadap produk domestik bruto. Sektor industri mengambil bahan baku dari sektor primer dan mengubahnya menjadi produk pengguna akhir. Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2023 menetapkan 1 (satu) indikator kinerja pada sasaran ini, adapun realisasi capaian sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian

			ı						I	0
			Tahun 2021		Tahun 2022			Capaian		
						Tanun 2022	_	Target	terhadap	
No	Indikator	Satuan					1		Akhir	Target
140	Kinerja	Satuari								
	, ,		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Renstra	Akhir
										Renstra
1.	Persentase	%	24,32	25,37	104,32	24,33	25,56	105,06	24,34%	105,01%
	kontribusi									
	sektor									
	industri									
	pengolahan									
	terhadap									
	PDRB									

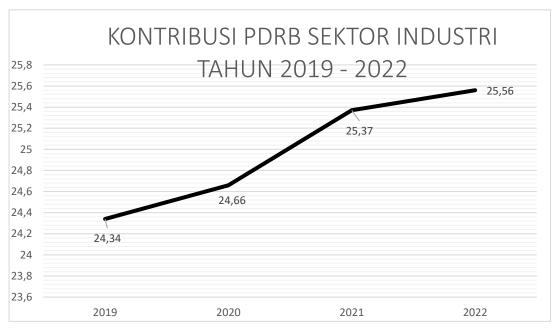
Capaian sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian di Tahun 2022 adalah sebesar 105,06%. Realisasi tahun 2022 mencapai 105,01%

apabila dibandingkan dengan target di tahun 2023 / akhir periode Renstra, adapun capaian dari masing-masing indikator dalam mewujudkan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB.

Sektor industri merupakan sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, untuk sektor industri pengolahan memberikan kontribusi yang cenderung selalu naik. Perkembangan industri memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, terutama terkait dengan penanaman modal, penggunaan bahan baku lokal, penyerapan tenaga kerja dan daya ungkit perkembangannya bagi sektor-sektor perekonomian lainnya.

Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri di Kabupaten Banyumas, hal ini juga berpengaruh terhadap kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2022 mencapai 25,56% dengan target 24,33% sehinga capaiannya sebesar 105,06%, adapun perkembangan persentase kontribusi sector industri pengolahan adalah sebagai berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Banyumas

Besarnya Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan tidak lepas dengan adanya peran industri yang ada di Kabupaten Banyumas, adapun kondisi jumlah Industri di Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

Tabel 13. Data Pertumbuhan Industri Kabupaten Banyumas 2019 - 2022

			Industri (Unit)	
No	Kecamatan	Besar	Menengah	Kecil
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Lumbir	-	-	2.160
2	Wangon	1	9	2.355
3	Jatilawang	-	2	913
4	Rawalo	-	1	1.239
5	Kebasen	-	5	1.473
6	Kemranjen	-	2	1.668
7	Sumpiuh	-	-	1.949
8	Tambak	-	-	1.866
9	Somagede	-	1	2.981
10	Kalibagor	-	4	844
11	Banyumas	-	2	1.713
12	Patikraja	-	2	978
13	Purwojati	-	1	2.186
14	Ajibarang	1	6	3.440
15	Gumelar	-	3	1.061
16	Pekuncen	-	1	2.650
17	Cilongok	-	8	7.673
18	Karanglewas	-	3	1.517
19	Kedungbanteng	-	2	939
20	Baturraden	1	-	509
21	Sumbang	-	1	944
22	Kembaran	1	2	835
23	Sokaraja	1	7	795
24	Purwokerto Selatan	-	5	216
25	Purwokerto Barat	1	4	410
26	Purwokerto Timur	-	4	327
27	Purwokerto Utara	-	2	375
	JUMLAH	6	77	44.016
	Tahun 2021	6	77	43.990
	Tahun 2020	6	77	43.845
	Tahun 2019	6	77	43.827

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah industri kecil, menengah dan besar di Kabupaten Banyumas berjumlah 44.099, sedangkan untuk industri kecil dan menengah (IKM) sendiri berjumlah 44.093. Kecamatan Cllongok menjadi penyumbang industri terbesar di Kabupaten Banyumas dengan jumlah 7.681 atau 17,42% dari jumlah industri yang ada di Kabupaten Banyumas.

SASARAN 2: Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan

Sektor Perdagangan merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor perdagangan terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukan kontribusi yang signifikan. Peranan sektor perdagangan dalam pembangunan ekonomi nasional dapat ditelusuri dari kontribusi masing-masing subsektor terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional atau terhadap produk domestik bruto.

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas menetapkan 1 (satu) indikator kinerja, adapun realisasi capaian sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan

			Tahun 2021		Tahun 2022				Capaian	
	Indikator		Tallall 2021		Tanan 2022			Target	terhadap	
No	Kinerja	Satuan							Akhir	Target
	ranonja		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Renstra	Akhir
										Renstra
1.	Persentase	%	15,23	15,23	100,00	15,24	15.50	101,71	15,25%	101,64%
	kontribusi									
	sektor									
	perdagangan									
	terhadap									
	PDRB									

Capaian sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan di tahun 2022 sebesar 101,71%. Realisasi tahun 2022 mencapai 101,64% apablia dibandingkan dengan target di tahun 2023 / akhir Renstra Perubahan, adapun capaian dari indikator dalam mewujudkan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

Sektor perdagangan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dalam rangka meningkatkan sektor perdagangan yaitu dengan melakukan revitalisasi pasar. Perkembangan pasar tradisonal memberikan implikasi pada meningkatnya kegiatan

perekonomian daerah, terutama yang digerakan oleh meningkatnya kebutuhan barang dan jasa dalam masyarakat.

Globalisasi ekonomi juga berdampak pada masuknya investor asing maupun lokal (luar Kabupaten Banyumas), salah satu yang saat ini marak dan tersebar di beberapa kecamatan adalah berkembangnya pasar Modern (seperti Supermarket, Minimarket) di wilayah kecamatan yang keberadaanya tidak dapat dicegah karena tuntutan globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa pasar modern dewasa ini sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup modern yang berkembang di masyarakat. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat belanja yang nyaman, bersih dengan harga yang tidak kalah menariknya. Berikut merupakan data pasar modern di Kabupaten Banyumas tahun 2022:

Tabel 15. Data Pasar Modern Kabupaten Banyumas 2022

No	Kecamatan	Toko Swalayan	Pusat Perbelanjaan
1	Lumbir	0	-
2	Wangon	5	-
3	Jatilawang	4	-
4	Rawalo	2	-
5	Kebasen	1	-
6	Kemranjen	3	-
7	Sumpiuh	4	-
8	Tambak	2	-
9	Somagede	0	-
10	Kalibagor	0	-
11	Banyumas	5	-
12	Patikraja	8	-
13	Purwojati	0	-
14	Ajibarang	6	-
15	Gumelar	2	-

No	Kecamatan	Toko Swalayan	Pusat Perbelanjaan /
16	Pekuncen	1	-
17	Cilongok	3	-
18	Karanglewas	4	-
19	Sokaraja	10	-
20	Kembaran	9	-
21	Sumbang	4	-
22	Baturaden	10	-
23	Kedungbanteng	1	-
24	Purwokerto Selatan	25	1
25	Purwokerto Barat	14	-
26	Purwokerto Timur	20	1
27	Purwokerto Utara	14	-
	JUMLAH	157	2

Selain pasar modern, di Kabupaten Banyumas juga terdapat pasar rakyat, berikut ini merupakan data pasar rakyat yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas:

Tabel 16. Data Pasar yang dikelola Dinperindag Kab. Banyumas Th. 2022

	Nama Pasar		Tahun
NO	Desa , Kecamatan	Kelas Pasar	Pembangunan
	Alamat		Pasar
1	Pasar Wage	I	2002
	Jl. Brigjen Katamso No. 1		
	Kec. Purwokerto Timur		
	Kel. Purwokerto Wetan		
	Kab. Banyumas		
2	Pasar Sarimulyo	II	1987
	Jl. K.H. Moh. Safei		
	Kec. Purwokerto Timur		
	Kel .Purwokerto Lor		
	Kab. Banyumas		
3	Pasar Cikebrok	IV	1989, 2018
	Jl. Kolonel Sugiri		
	Kec. Purwokerto Timur		

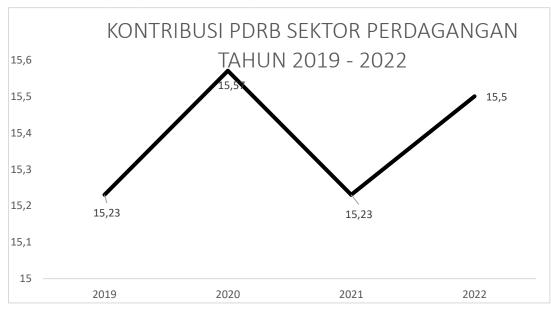
	T		/
	Nama Pasar		Tahun /
NO	Desa , Kecamatan	Kelas Pasar	Pembangunan
	Alamat		Pasar
	Kel. Kranji		
	Kab. Banyumas		
4	Pasar Manis	ı	2015, 2016
	Jl. Jend, Gatot Soebroto		2010, 2010
	Kec. Purwokerto Barat		
	Kel .Kedungwuluh		
	Kab. Banyumas		
5	Pasar Pon	II	1005 2021
5		11	1985, 2021
	Jl. Jend. Sudirman Barat		
	Kec. Purwokerto Barat		
	Kel. Bantarsoka		
	Kab. Banyumas		
6	Pasar Kober	IV	1991
	Jl. Raya Kober		
	Kec. Purwokerto Barat		
	Kel. Kober		
	Kab. Banyumas		
7	Pasar Situmpur	III	1989
	Jl. Pramuka		
	Kec. Purwokerto Selatan		
	Kel. Pwt Kulon		
	Kab. Banyumas		
8	Pasar Peksi Bacingah	II	2015, 2016
	Jl. Kongsen No, 47	"	2013, 2010
	Kec. Purwokerto Slatan		
	Kel. Pwt Kulon		
	Kab. Banyumas	- 111	0040
9	Pasar Ikan Hias Mina Restu	III	2012
	Jl. Brigjen Encung		
	Kec. Purwokerto Utara		
	Kel. Purwanegara		
	Kab. Banyumas		
10	Pasar Larangan	II	2013
	Kec. Kembaran		
	Ds. Kembaran		
L	Kab. Banyumas		
11	Pasar Kemukusan	III	1970, 2019
	Jl. Wisata Baturraden Timur		,
	Kec. Sumbang		
	Desa Ciberem		
	Kab. Banyumas		
12	Pasar Sokaraja		2013, 2014, 2015,
'-	Jl. Jend, Gatot Soebroto	'	2016, 2017
	Kec. Sokaraja		2010, 2011
	Ds. Sokaraja Kidul		
40	Kab. Banyumas	111	2000
13	Pasar Sangkalputung	III	2009
	Jl. Menteri Supeno No. 1		

	Nama Pasar		Tahun
NO	Desa , Kecamatan	Kelas Pasar	Pembangunan
	Alamat		Pasar
	Kec. Sokaraja		
	Ds. Sokaraja Tengah		
	Kab. Banyumas		
14	Pasar Banyumas	II	1980, 2020, 2021
	Jl, Jend, Gatot Soebroto		
	Kec. Banyumas		
	Ds. Sudagaran		
	Kab. Banyumas		
15	Pasar Buntu	III	2018
10	Jl. Raya Buntu	""	2010
	Kec. Kemranjen		
	I		
	Ds. Pagelarang		
16	Kab. Banyumas	III	1005 2010
10	Pasar Wijahan	III	1985, 2018
	Jl. Raya Buntu-Kemranjen		
	Kec. Sumpiuh		
	Ds. Sumpiuh		
	Kab. Banyumas		0047
17	Pasar Sumpiuh	l	2017
	Jl. Stasiun No. 1		
	Kec. Sumpiuh		
	Ds. Sumpiuh		
	Kab. Banyumas		
18	Pasar Tambak	III	2017, 2018, 2020,
	Jl. Raya Tambak		2021
	Kec. Tambak		
	Ds. Kamulyan		
	Kab. Banyumas		
19	Pasar Pahing	II	2015, 2016, 2017
	Jl. Kertawibawa		
	Kec. Karanglewas		
	Ds. Pasir Lor		
	Kab. Banyumas		
20	Pasar Karangtengah	IV	1987, 2018
	Jl. Desa Karang Tengah		,
	Kec. Cilongok		
	Ds. Karangtengah		
	Kab. Banyumas		
21	Pasar Ajibarang	ı	1995
	Jl. Raya Pacasan		
	Kec. Ajibarang		
	Ds. Ajibarang Wetan		
	Kab. Banyumas		
22	Pasar Legok	III	2016, 2017
	Jl. Stasiun No. 1	111	2010, 2011
	Kec. Pekuncen		
	Ds. Pekuncen		
	Kab. Banyumas		

NO	Nama Pasar Desa , Kecamatan	Kelas Pasar	Tahun Pembangunan
00	Alamat	1	Pasar
23	Pasar Wangon	I	1997, 2019, 2020
	Jl. Raya Utara - Wangon		
	Kec. Wangon Ds. Banteran Wetan		
24	Kab. Banyumas Pasar Jatilawang	II	2015
24	Jl. Raya Jatilawang	"	2015
	Kec. Jatilawang		
	Ds. Tunjung		
	Kab. Banyumas		
25	Pratistha Harsa	ı	2012
23	Jl. Jend. Soedirman No 08.	•	2012
	Kec. Purwokerto Timur		
	Kel. Sokanegara		
	Kab. Banyumas		
26	Pasar Proliman		2019
	Jl. Jend. Soedirman No 08.		
	Kec. Purwokerto Timur		
	Kel. Sokanegara		
	Kab. Banyumas		

Dapat dijelaskan dari tabel diatas bahwa pasar yang dikelola Dinperindag Kabupaten Banyumas memiliki 7 (tujuh) kelas pasar I, 7 (tujuh) kelas pasar II, 8 (delapan) kelas pasar III dan 3 (tiga) kelas pasar IV.

Untuk Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di tahun 2022 adalah 15,50% dengan target 15,24%, sehingga capaiannya sebesar 101,71%, Adapun perkembangan persentase kontribusi PDRB sektor perdagangan adalah sebagai berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Banyumas

Peran ekspor di Kabupaten Banyumas juga berperan terhadap kontribusi PDRB sektor perdagangan, Kabupaten Banyumas merupakan daerah agraris yang memiliki potensi disektor agro industri, salah satunya adalah industri gula kelapa. Gula kelapa sebagai produk unggulan Kabupaten Banyumas telah berperan penting dan menjadi salah satu motor penggerak perekonomian di Kabupaten Banyumas.

Gula kelapa bisa diproduksi dalam bentuk gula kelapa cetak dan gula semut/kristal. Gula semut merupakan salah satu diversifikasi produk gula kelapa yang berbentuk serbuk. Gula semut memiliki keunggulan dibandingkan gula kelapa cetak, antara lain lebih mudah larut karena berbentuk serbuk, daya simpan yang lebih lama sekitar 1 hingga 2 tahun, kadar air berkisar 2,5 persen sampai 3 persen berat bersih, bentuknya lebih menarik, pengemasan dan pengangkutan lebih mudah, rasa dan aromanya lebih khas, harga jual yang lebih tinggi dan harganya cenderung stabil. Disamping itu, gula semut (terutama yang organik) merupakan komoditas yang banyak diminati di luar negeri sebagai produk substitusi gula pasir.

Saat ini, permintaan pasar ekspor untuk gula semut terus meningkat seiring dengan kecenderungan konsumen luar negeri untuk mengkonsumsi produk yang alami dan menyehatkan, di tahun 2022 untuk ekspor gula kelapa yang dimonitoring oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas sebanyak 12.495,90 ton dengan nilai sebesar \$ 27.487.981,01

Kegiatan ekspor yang dilakukan ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Banyumas, berikut ini merupakan data ekspor yang dimonitoring oleh Dinperindag Kabupaten Banyumas:

Tabel 18. Data Ekspor Non Migas Tahun 2022 Kab. Banyumas.

No	Komoditas	Vol (Ton)	USD	Negara Tujuan
1	Kayu Olahan	86.050,89	34.038.876,07	Malaysia, Taiwan, China, Korea Selatan, USA, Hongkong, Italy, Belanda, Myanmar, India, Meksiko
2	Gula Kelapa	12.495,90	27.487.981,01	Singapura, Australia, USA, Afrika Selatan, Meksiko, Hungaria, Perancis, Belanda, Saudi Arabia, Inggris, Bulgaria, Korea Selatan, Malaysia, Brazil, Fiji, Portugal, Germany, Colombia, Vietnam, Israel, Taiwan

No	Komoditas	Vol (Ton)	USD	Negara Tujuan
3	Jelly Grass	325,31	538.233,75	Malaysia, Kamboja, Thailand
4	Minyak Atsiri	764,22	16.629.328,16	Singapura, Spanyol, Perancis, Jerman, Belanda, Swiss, India, Belgium, Spain, USA, Italy
5	Krupuk	29,51	49.590,52	Saudi Arabia
6	Sohun	1,70	3.687,16	Saudi Arabia
7	Kemiri	2,68	7.443,05	Saudi Arabia
8	Emping	4,39	20.780,84	
	Melinjo			Saudi Arabia
9	Mie Telor	11,74	21.314,09	Saudi Arabia
10	Beras Jagung	0,62	848,20	Saudi Arabia
11	Masako Ayam	0,61	2.133,61	Saudi Arabia
12	Kerupuk Sari	10,83	18.327,20	Saudi Arabia
13	Blue Band	3,87	14.917,49	Saudi Arabia
14	Bulu Mata	0,39	29.900,00	India
Total Ekspor		78.863.361,15		
Total Impor		315.241,00		
Nila	i Ekspor Bersih		78.548.120,15	

Dari tabel diatas dapat diketahui realisasi nilai ekspor di tahun 2022 sebesar \$ 78.863.361,15, sedangkan untuk nilai impor di tahun 2022 sebesar \$ 315.241,00, dikarenakan perhitungan nilai ekspor bersih perdagangan adalah nilai ekspor dikurangi nilai impor, maka tahun 2022 untuk nilai ekspor bersih mencapai \$ 78.548.120,15. Kayu menjadi komoditas yang paling tinggi nilai ekspornya dengan nilai mencapai \$ 34.038.876,07 dengan volume 86.050,89 ton.

Selain ekspor, Pedagang Kaki Lima harus diakui adalah cermin dari beragamnya tingkat ekonomi masyarakat. Disatu sisi, pemerintah daerah ingin menertibkan masyarakatnya hingga slogan bersih, nyaman dan aman terpenuhi. Namun disisi lain, Pedagang Kaki Lima yang mana merupakan sektor usaha kecil ingin tetap beroperasi untuk mencari nafkah bagi masyarakat umum.

Maka demi terciptanya Pedagang Kaki Lima yang tertib dan tertata sesuai tempat yang diijinkan perlu adanya pembinaan dan penataan sesuai dengan produk hukum yang mengatur tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Banyumas, adapun produk hukum yang dimaksud adalah :

 Perda Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2011 tentang Lokasi, Waktu, Bentuk dan Tata Cara Permohonan Surat Penempatan Pedagang Kaki Lima;
- Keputusan Bupati Banyumas Nomor 510.17/285/2011 tentang Lokasi dan Waktu Kegiatan Pedagang Kaki Lima di Purwokerto

Di tahun 2022 pemerintah Kabupaten Banyumas lewat Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pembinaan dan penataan pedagang kaki lima sebanyak 557 PKL, adapun jumlah PKL yang ada di Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

Tabel 19. Data PKL Dinperindag Kab. Banyumas Th. 2022 menurut kecamatan.

No	Kecamatan	Jumlah PKL keseluruhan	Jumlah PKL yang sudah dibina dari tahun 2022
1	Kecamatan Purwokerto Timur	1.631	400
2	Kecamatan Purwokerto Barat	244	75
3	Kecamatan Purwokerto Utara	205	10
4	Kecamatan Purwokerto Selatan	428	15
5	Kecamatan Baturaden	45	-
6	Kecamatan Kedungbanteng	54	-
7	Kecamatan Karanglewas	28	-
8	Kecamatan Cilongok	31	-
9	Kecamatan Ajibarang	218	18
10	Kecamatan Gumelar	15	-
11	Kecamatan Pekuncen	10	-
12	Kecamatan Jatilawang	64	-
13	Kecamatan Rawalo	18	-
14	Kecamatan Purwojati	11	-
15	Kecamatan Wangon	32	-
16	Kecamatan Lumbir	61	-
17	Kecamatan Banyumas	266	16
18	Kecamatan Somagede	40	-
19	Kecamatan Kebasen	123	4
20	Kecamatan Patikraja	57	-
21	Kecamatan Sumpiuh	54	-
22	Kecamatan Tambak	61	-
23	Kecamatan Kemranjen	114	-
24	Kecamatan Sokaraja	139	19
25	Kecamtan Kalibagor	26	-
26	Kecamatan Kembaran	65	-
27	Kecamatan Sumbang	45	-
Juml	ah seluruh PKL	4.085	557

Dari tabel diatas diketahui bahwa Kecamatan Purwokerto Timur/memiliki jumlah PKL terbanyak di Kabupaten Banyumas, yaitu sejumlah 1.631 PKL atau 40% dari total PKL yang ada di Kabupaten Banyumas.

Untuk urusan perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas juga melakukan penertiban untuk perlindungan konsumen melalui pelayanan tera / tera ulang, tujuan dilakukannya tera / tera ulang yaitu untuk menjamin kebenaran pengukuran pada alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, adapun kegiatan pelayanan tera/tera ulang yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Data Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun 2022.

No	Bulan	UTTP yang ditera / tera ulang
1	Januari	1.534
2	Februari	3.236
3	Maret	5.647
4	April	845
5	Mei	3.410
6	Juni	3.540
7	Juli	6.833
8	Agustus	2.995
9	September	3.493
10	Oktober	4.685
11	November	4.707
12	Desember	1.869
	JUMLAH	42.794

Diketahui dari tabel diatas bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas tahun 2022 melaksanakan pelayanan tera/tera ulang kepada Pengguna, Pemilik, Pemegang alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (P3UTTP) sebanyak 42.794 alat UTTP yang ada di Kabupaten Banyumas.

b) Akuntabilitas Keuangan

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Anggaran	dan Realisasi ı	oer Sasaran	Strategis	Dinperindag Kal	o. Bms TA 2022

No	Sacaran Stratagia	Rencana	Realisasi	%
INO	Sasaran Strategis	(Rp.)	(Rp.)	70
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	923,294,000	821,911,598	89.02%
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	15,878,182,544	11,263,607,255	70.94%
	TOTAL	16,801,476,544	12,085,518,853	71.93%

Dari tabel diatas diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas tahun 2022.

Untuk capaian anggaran sasaran 1 yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian sebesar 89,02%, penyerapan anggaran tersebut cukup baik dan sisa anggaran yang ada merupakan efisiensi dari belanja yang sudah dilaksanakan.

Sedangkan capaian anggaran sasaran 2 yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan sebesar 70,94%, hal tersebut disebabkan oleh:

- Tidak terealisasinya pelaksanaan operasi pasar dikarenakan selisih antara harga acuan dan harga pasar untuk 3 komoditas yaitu cabai rawit merah, cabai merah keriting dan bawang merah tidak terlalu tinggi, pelaksanaan operasi pasar tersebut dianggarkan senilai Rp. 950.400.000,00-.
- 2. Pengadaan tanah untuk Pasar Sangkalputung dan kelengkapannya senilai Rp. 3,166,725,000,00 tidak terealisasi dikarenakan masih dalam tahap penelusuran dokumen oleh tim penelusur terkait status kepemilikan tanah.
- Bansos alat promosi untuk IKM sebesar Rp. 58.806.500,00- merupakan anggaran pokir perubahan yang tidak terlaksana karena belum adanya proposal.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun

2022, dapat diketahui dari capaian 2 kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2022, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 22. Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Dinperindag Kab. Bms. TA. 2022

			Persentase rata-rata	Realisasi Anggaran	
No	Sasaran	Jumlah Indikator	capaian kinerja sasaran	(Rp.)	%
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	1	105,06%	821,911,598	89.02%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	1	101,71%	11,263,607,255	70.94%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun anggaran 2022 efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Banyumas.

c) Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Dari Tabel 22 dapat dilihat terdapat 2 (dua) sasaran menunjukan angka capaian kinerja sasaran diatas 100%. Keberhasilan pencapaian kinerja anggaran dengan menggunakan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 23. Tingkat Efisensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	1	105,06%	89.02%	16,04%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	1	101,71%	70.94%	30,77%

d) Program / Kegiatan yang Mendukung IKU

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) didukung oleh program kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24. Program / Kegiatan pendukung IKU beserta capaian di tahun 2022

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembagunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	91	149.99	164.82
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Cakupan bina kelompok disektor perindustrian	Kelompok	26	31	119.23

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI), Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Menengah, Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dikeluarkan oleh instansi terk	%	127	100	121.26
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota yang difasilitasi	ijin	11	17	154.55
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data informasi industri yang tersedia	%	40	45	112.5
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah informasi industri yang tersedia	informasi	1	1	100
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	84.95	87.74	103.28

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang memiliki izin usaha	Unit	103	159	154.37
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah gudang yang memiliki TDG	Unit	43	56	130.23
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase Penerbitan STPW yang tepat waktu	%	100	100	100
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah penerbitan SIUP minol gol B dan C yang difasilitasi	Berkas	1	1	100
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase PKL yang tertata dan terbina sesuai tempat yang diijinkan	%	50.00	96.06	192.12
	Persentase penerimaan PAD dari retribusi pelayanan pasar	%	100	147.17	147.17
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola dan / direvitalisasi	Keg	26	26	100
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	Kelompok	54	58	107.41
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga barang	%	15	9,06	139,60

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok dan barang penting yang disusun	Dokumen	300	319	106.33
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	78	90.6	116.15
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	USD	30.000.000	78.548.120,15	261,83
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi dan pembinaan pelaku usaha yang dilaksanakan	Keg	5	8	160
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	%	99.51	170.49	171.33
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pelayanan tera / tera ulang dan Pengawasan yang dilaksanakan	Keg	27	48	177.78
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usaha yang dipromosikan	%	0.7	1.12	160
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah kegiatan Promosi Produk Dalam Negeri yang dilaksanakan	Keg	12	18	150

e) Prestasi dan Inovasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan amanahnya telah dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Prestasi dan penghargaan yang diterima Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas di tahun 2022 adalah:

Tabel 25. Prestasi dan Penghargaan Dinperindag Kab. Banyumas 2022.

No	Nama Penghargaan	Dari	Penerima
1.	Juara 1 Lomba Menu Makanan Pembuka pada Pameran Kuliner Pendamping Beras Tingkat Nasional	PDIP	Dinperindag Kab. Banyumas
2.	Juara 2 Lomba Menu Sop Pameran Kuliner Pendamping Beras Tingkat Nasional	PDIP	Dinperindag Kab. Banyumas
3.	Juara Harapan I Lomba Rancangan Busana Berbahan Tenun atau Lurik Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah	Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah	Dinperindag Kab. Banyumas
4.	Penghargaan Primaniyatra Kategori Eksportir Pemula pada Trade Expo Indonesia (TEI) 2022	Kementrian Perdagangan	Dinperindag Kab. Banyumas
5.	Juara I pada Festival Fashion Banyumas Raya	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap	Dinperindag Kab. Banyumas
6.	Juara III pada Festival Fashion Banyumas Raya	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap	Dinperindag Kab. Banyumas

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas juga menciptakan inovasi guna mempermudah pelayanan berbasis digital serta mempermudah perolehan akses data dan informasi kepada pengguna ataupun masyarakat umum, adapun invoasi yang dimilki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

Tabel 26. Inovasi Dinperindag Kab. Banyumas 2022.

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Manfaat
140			
1.	E-Retribusi Pasar	Belum adanya database pedagang yang akurat dan menindaklanjuti hasil audit BPK yang menuntut penyajian data secara cepat dan akurat serta masih belum dapat diketahui data realisasi pendapatan secara rinci	 Transparansi pengelolaan keuangan daerah Mencegah korupsi Mencegah peredaran uang palsu Informasi realisasi retribusi pasar secara realtime Tertib administrasi
2.	SIMETRO (Sistem Informasi Kemetrologian)	Pelayanan kemetrologian masih bersifat manual mulai dari proses pendaftaran, pembayaran sampai dengan pembuatan surat keterangan hasil pengujian masih belum terintegrasi dalam satu sistem. Selain itu Bidang Metrologi juga belum mempunyai database potensi Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Pemilik UTTP.	 Database UTTP (sedang proses input) Dapat menghitung potensi UTTP Pelayanan Online Meningkatkan proses pelayanan Tertib Administrasi
3.	SIGAOKMAS (Sistem Informasi Harga Pangan Pokok Banyumas)	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam satu kabuapten/kota merupakan upaya untuk mengumpulkan data mengenai perkembangan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah pasar rakyat yang dilakukan sepanjang tahun. Dari kegiatan ini harga dan stok	 Pemberian informasi harga secara aktual Database harga bahan pokok dan barang penting lainnya Sebagai penentu kebijakan terkait stabilisasi harga

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Manfaat
4.	SIIMASTER (Sistem Informasi Industri Banyumas Terpadu)	bahan pokok dan barang penting dapat terdokumentasi perkembangannya setiap hari, dilakukan analisis data, dan disebarkanluaskan kepada masyarakat Banyak pelaku industri yang belum memanfaatkan teknologi informasi dengan maksimal. Beberapa kendala yang dihadapi sehingga belum memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi yaitu, biaya, kepraktisan, waktu, dan pemahaman teknologi.	Secara umum aplikasi ini memudahkan masyarakat umum untuk mengenal potensi dan profil industri di Kabupaten Banyumas. Fitur yang dihadirkan dapat mengakomodasi kebutuhan pelaku industri di Banyumas. Fitur tersebut diantaranya penayangan produk, pendaftaran pelatihan dan konsultasi online.

B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi pagu dan realisasi anggaran terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Anggaran dan Realisasi per Sasaran Strategis Dinperindag Kab. Bms TA 2022

No	Sasaran Strategis	Rencana	Realisasi	%
INO	(Rp.)		(Rp.)	70
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	923,294,000	821,911,598	89.02%
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	15,878,182,544	11,263,607,255	70.94%
	TOTAL	16,801,476,544	12,085,518,853	71.93%

Dari tabel diatas diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas tahun 2022.

Untuk capaian anggaran sasaran 1 yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian sebesar 89,02%, penyerapan anggaran tersebut cukup

baik dan sisa anggaran yang ada merupakan efisiensi dari belanja yang sudah dilaksanakan.

Sedangkan capaian anggaran sasaran 2 yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan sebesar 70,94%, hal tersebut disebabkan oleh:

- 1. Tidak terealisasinya pelaksanaan operasi pasar dikarenakan selisih antara harga acuan dan harga pasar untuk 3 komoditas yaitu cabai rawit merah, cabai merah keriting dan bawang merah tidak terlalu tinggi, pelaksanaan operasi pasar tersebut dianggarkan senilai Rp. 950.400.000,00-.
- 2. Pengadaan tanah untuk Pasar Sangkalputung dan kelengkapannya senilai Rp. 3,166,725,000,00 tidak terealisasi dikarenakan masih dalam tahap penelusuran dokumen oleh tim penelusur terkait status kepemilikan tanah.
- Bansos alat promosi untuk IKM sebesar Rp. 58.806.500,00- merupakan anggaran pokir perubahan yang tidak terlaksana karena belum adanya proposal.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2022, dapat diketahui dari capaian 2 kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2022, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 28. Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Dinperindag Kab. Bms. TA. 2022

			Persentase rata-rata	Realisasi Ang	garan
No	Sasaran	Jumlah Indikator	capaian kinerja sasaran	(Rp.)	%
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	1	105,06%	821,911,598	89.02%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	1	101,71%	11,263,607,255	70.94%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun anggaran 2022 efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Banyumas.

IV. PENUTUP

Secara umum, capaian indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 termasuk dalam kategori sangat tinggi dan berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan, bahkan melebihi, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 26. Capaian Indikator Kinerja Dinperindag Kab. Banyumas Tahun 2022.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	24,33%	25,56%	105,06%
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	15,24%	15.50%	101,71%

Namun dalam mencapai hasil tersebut masih terdapat kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Adapun hambatan yang terdapat di dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021, antara lain sebagai berikut :

- Tidak terealisasinya pelaksanaan operasi pasar dikarenakan selisih antara harga acuan dan harga pasar untuk 3 komoditas yaitu cabai rawit merah, cabai merah keriting dan bawang merah tidak terlalu tinggi, pelaksanaan operasi pasar tersebut dianggarkan senilai Rp. 950.400.000,00-.
- Pengadaan tanah untuk Pasar Sangkalputung dan kelengkapannya senilai Rp. 3,166,725,000,00 tidak terealisasi dikarenakan masih dalam tahap penelusuran dokumen oleh tim penelusur terkait status kepemilikan tanah.
- Bansos alat promosi untuk IKM sebesar Rp. 58.806.500,00- merupakan anggaran pokir perubahan yang tidak terlaksana karena belum adanya proposal.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas untuk hambatan di atas antara lain sebagai berikut :

- Melakukan monitoring harga kebutuhan barang pokok dan barang penting lainnya secara berkala, sehingga analisis terkait hasil monitoring tersebut dapat menjadi acuan pelaksanaan operasi pasar.
- Berkoordinasi/rapat secara rutin dan berkala dengan Bagian Aset BKAD Kabupaten Banyumas dan BPN serta pihak-pihak terkait lainnya tentang penelusuran dokumen dan status tanah untuk pengadaan tanah Pasar Sangkalputung.
- 3. Melakukan survey dan sosialisasi terhadap IKM yang membutuhkan bantuan sarana dan prasarana serta memfasilitasi terkait pengajuan proposalnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 kami buat. Kami menyadari bahwa LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penyusunan LKjIP di masa yang akan datang.

LAMPIRAN LKJIP 2022 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Drs. PURWADI SANTOSO, M.Hum.

Jabatan

: Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: Ir. ACHMAD HUSEIN

Jabatan

: Bupati Banyumas

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

BANYUMAS

CHMAD HUSEIN

Januari 2022

PIHAK PERTAMA,

Purwokerto,

PIt. KEPALA DINPERINDAG KABUPATEN BANYUMAS ASISTEN PEREKONOMIAN DAN

PEMBANGUNAN

PURWADI SANTOSO, M.Hum

NIP: 19630629 198903 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan, perdagangan dan jasa	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	24,33%
		Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	15,24%
2.	Meningkatnya pertumbuhan perindustrian	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	24,33%
3.	Meningkatnya pertumbuhan perdagangan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	15,24%

NO	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp.	1.010.000.000,00	APBD, DBHCHT
2.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/kota	Rp.	49.147.000,00	APBD
3.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp.	19.147.000,00	APBD
4.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	135.000.000,00	APBD
5.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp.	62.000.000,00	APBD
6.	Program Pengembangan Ekspor	Rp.	145.734.000,00	APBD
7.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp.	63.000.000,00	APBD
8.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	4.443.438.544,00	APBD
9.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp	265.000.000,00	APBD
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp.	26.980.441.628,00	APBD
	JUMLAH	Rp.	33.172.908.172,00	

Purwokerto, Januari 2022

PIHAK KEDUA,

BUPATI BANYUMAS

PIHAK PERTAMA,

PIt. KEPALA DINPERINDAG KABUPATEN BANYUMAS ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Drs. PURWADI SANTOSO, M.Hum NIP. 19630629 198903 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: TITIK PUJIASTUTI, SH., M.Pd.

Jabatan

: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: Ir. ACHMAD HUSEIN

Jabatan

: Bupati Banyumas

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto.

Februari 2022

PIHAK KEDUA,

THRANYUMAS

ACHMAD HUSEIN

PIHAK PERTAMA,

KEPALA DINPERINDAG KABUPATEN BANYUMAS

<u>TITIK PUJIASTUTI, SH., M.Pd</u>

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan, perdagangan dan jasa	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	24,33%
		Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	15,24%
2.	Meningkatnya pertumbuhan perindustrian	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	24,33%
3.	Meningkatnya pertumbuhan perdagangan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	15,24%

NO	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp.	1.010.000.000,00	APBD, DBHCHT
2.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/kota	Rp.	49.147.000,00	APBD
3.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp.	19.147.000,00	APBD
4.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	135.000.000,00	APBD
5.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp.	62.000.000,00	APBD
6.	Program Pengembangan Ekspor	Rp.	145.734.000,00	APBD
7.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp.	63.000.000,00	APBD
8.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	4.443.438.544,00	APBD
9.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp	265.000.000,00	APBD
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp.	26.980.441.628,00	APBD
	JUMLAH	Rp.	33.172.908.172,00	

Purwokerto, Februari 2022

PIHAK PERTAMA,

KEPALA DINPERINDAG KABUPATEN BANYUMAS

TUTIK PUJIASTUTI, SH., M.Pd. NIP. 19640402 199103 2 005

CHMAD HUSEIN

PIHAK KEDUA,

BUPATI BANYUMAS

LAMPIRAN LKJIP 2022

DOKUMENTASI PENGHARGAAN TAHUN 2022

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS

PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH DINPERINDAG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

Juara 1 Lomba Menu Makanan Pembuka pada Pameran Kuliner Pendamping Beras Tingkat Nasional



Juara 2 Lomba Menu Sop Pameran Kuliner Pendamping Beras Tingkat Nasional



Juara Harapan I Lomba Rancangan Busana Berbahan Tenun atau Lurik Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah





Penghargaan Primaniyatra Kategori Eksportir Pemula pada Trade Expo Indonesia (TEI) 2022





Juara I dan Juaran III pada Festival Fashion Banyumas Raya





LAMPIRAN LKJIP 2022 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dinperindag Tahun 2022

Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target		Realisasi Kinerja	Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022	Tingkat Capaian kinerja Tahun 2022
Sasarany rogramy regulating sas regulating			Turget _	1	2	3	4		(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=9/4*100
[SASARAN]	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	24.33	25.37	25.37	25.37	25.56	25.56	105.06
Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian									
[PROGRAM]	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan	%	91	110.49	131.08	145.73	149.99	149.99	164.82
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	indikator pembagunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK								
[KEGIATAN]	Cakupan bina kelompok disektor perindustrian	Kelompok	26	9	6	6	10	31	119.23
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota									
[SUBKEGIATAN]	Jumlah industri masyarakat yang ikut pengembangan SDM industri	Unit	35	N/A	0	40	0	40	114.29
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri									
[SUBKEGIATAN]	Jumlah sarana maupun prasarana untuk klaster industri yang tersalurkan	Unit	10	10	0	0	1	11	110
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		-		7	1	_		
Industri									
[SUBKEGIATAN]	Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang dibina (DBHCHT)	Unit	165	N/A	25	100	75	200	121.21
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran	Peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Unit	23	0	25	1	0	26	113.04
[PROGRAM]	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin	%	127	100	100	100	100	100	121.26
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	usaha industri (IUI), Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Menengah, Izin								
	Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang								
	dikeluarkan oleh instansi terkait								
[KEGIATAN]	Jumlah penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri	ijin	11	3	7	6	1	17	154.55
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin	(IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri	9			•	Ü	-		151155
Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	(IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota yang difasilitasi								
Kewenangan Kabupaten/Kota	(ii ki) kewenangan kabapaten/kota yang anasintasi								
[SUBKEGIATAN]	Jumlah Komitmen IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota yang	Keg	10	3	7	6	1	17	170
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan	difasilitasi	Keg	10	3	1	ŭ	-	1,	170
Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang	unusintusi								
Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara									
Elektronik									
[SUBKEGIATAN]	Jumlah industri yang diawasi perizinannya	Unit	35	11	14	20	5	50	142.86
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam	Jumlah laporan hasil pengawasan perizinan yang tersusun	Laporan	35	11	14	20	5	50	
[PROGRAM]	Persentase data informasi industri yang tersedia	%	40	45	45	45	45	45	112.5
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	respectable data information fluid tersedia	,,		.5	.5	.5	.5	.5	112.5
[KEGIATAN]	Jumlah informasi industri yang tersedia	informasi	1	0	0	0	1	1	100
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan	78			_		_		_	
IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota									
[SUBKEGIATAN]	Jumlah industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SiiNas) yang	Unit	30	3	6	10	11	30	100
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan	difasilitasi	Oille	50	J	ŭ	10		30	100
Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi	undsinedsi								
Industri Nasional (SIINas)									
[SUBKEGIATAN]	Jumlah IKM yang taat dalam penyampaian data ke SIINas	IKM	5	3	14	4	0	21	420
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan	Samual Interpretation and the Silves			J			· ·		120
Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas									
[SASARAN]	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	15.24	15.23	15.23	15.23	15.5	15.5	101.71
Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	P	*=					13.3	15.5	
[PROGRAM]	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	84.95	85.65	85.78	85.87	87.74	87.74	103.28
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		,~	555	33.03	55.76	33.07	37.74	07.74	133.20
[KEGIATAN]	Jumlah pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang memiliki	Unit	103	134	134	159	159	159	154.37
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha	izin usaha	Offic	103	134	134	139	133	139	134.37
Toko Swalayan	iziii dadiid								
10ko Swalayali					1	i i		l	

Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target		Realisasi Kinerja	a Pada Triwulan		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian kineria Tahun 2022
casalin, rogram, regulating to regulating	manado milojo dadam, i togram, megatam, dad megatam	Julium	- Luiget _	1	2	3	4	Kinerja Tahun 2022	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=9/4*100
[SUBKEGIATAN]	Jumlah peserta sosialisasi perijinan di sektor perdagangan yang dilaksanakan	Orang	30	14	6	0	18	38	126.67
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat									
Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat	Keg	35	22	25	0	23	70	200
Terintegrasi Secara Elektronik	Perbelanjaan dan toko swalayan yang difasilitasi								
[KEGIATAN]	Jumlah gudang yang memiliki TDG	Unit	43	45	49	51	56	56	130.23
Penerbitan Tanda Daftar Gudang			_						
[SUBKEGIATAN]	Jumlah Pelaku Usaha yang di Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	pelaku usaha	2	3	4	2	2	11	550
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	D D Liu CTDW Li	0/	100	21/2	21/2		100	400	400
[KEGIATAN]	Persentase Penerbitan STPW yang tepat waktu	%	100	N/A	N/A	U	100	100	100
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri									
[SUBKEGIATAN]	Jumlah Pelaku Usaha yang di Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan	pelaku usaha	1	N/A	N/A	0	1	1	100
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau	Surat Tanda Pendaftaran dan atau Lanjutan Waralaba (STPW) dalam negeri	ретаки изапа	1	N/A	N/A	U	1	1	100
Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Surat Tanua Fendantaran dan atau Lanjutan Wararaba (STFW) dalam negeri								
[KEGIATAN]	Jumlah penerbitan SIUP minol gol B dan C yang difasilitasi	Berkas	1	0	0	0	1	1	100
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan	Juman penerbitan Stor minor gor B dan C yang dilasintasi	Derkas	1	· ·	o	O	1	1	100
C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat									
C untuk rengeter dan renjuar tangsung windin di rempat									
[SUBKEGIATAN]	Jumlah usaha perdagangan minol gol B dan C yang difasilitasi	pelaku usaha	15	N/A	N/A	10	6	16	106.67
Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol	Samuel asama perangangan minorgor s ann e yang anasimasi	pelaka asana	13	,	,	10	· ·	10	100.07
Golongan B dan C									
[PROGRAM]	Persentase PKL yang tertata dan terbina sesuai tempat yang dijjinkan	%	50.00	88.07	88.89	97.63	96.06	96.06	192.12
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	,	,-							
	Persentase penerimaan PAD dari retribusi pelayanan pasar	%	100	25.79	55.91	91.92	147.17	147.17	147.17
[KEGIATAN]	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola dan / direvitalisasi	Keg	26	26	26	26	26	26	100
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		_							
[SUBKEGIATAN]	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang tersedia dan terpelihara	Unit	26	26	26	26	26	26	100
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan									
[SUBKEGIATAN]	Jumlah Sarana Distribusi perdagangan yang difasilitasi	Unit	26	26	26	26	26	26	100
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									
[KEGIATAN]	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	Kelompok	54	35	39	56	58	58	107.41
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di									
Wilayah Kerjanya									
[SUBKEGIATAN]	Jumlah Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang tertata/dibina sesuai dengan	Orang	300	100	50	348	130	628	209.33
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	tempat yang diijinkan								
[PROGRAM]	Koefisien variasi harga barang	%	15	8.04	9.94	9.74	9.06	9.06	139.6
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG									
PENTING				_					
[KEGIATAN]	Jumlah laporan pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok dan barang	Dokumen	300	63	62	65	129	319	106.33
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	penting yang disusun	1							
Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Installation of the Additional	a alalii waat i	18		45	23	22	23	127.78
[SUBKEGIATAN]	Jumlah pelaku usaha/distribusi barang yang dipantau	pelaku usaha	18	11	15	23	23	23	127.78
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada		1							
Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		1							
[SUBKEGIATAN]	Jumlah operasi pasar yang dilaksanakan	Keg	1	29	0	0	0	29	2900
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1	Jumlah kegiatan Pasar Murah yang dilaksanakan	Keg	4	N/A	2	1	11	14	
[KEGIATAN]	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	78	11.3	29.18	38.32	90.6	90.6	116.15
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			, ,	11.0	23.10	33.32	30.0	30.0	110.15
[SUBKEGIATAN]	Jumlah pupuk dan pestisida yang disalurkan	Ton	16263,78	3267.11	5166	2642.67	7254.15	18329.93	112.7
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi									

Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target		Realisasi Kinerja	a Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022	Tingkat Capaian kinerja Tahun 2022
				1	2	3	4		(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=9/4*100
[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	USD	30000000	6521512.13	18195197.12	29320603.55	78548120.15	78548120.15	261.83
[KEGIATAN] Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi dan pembinaan pelaku usaha yang dilaksanakan	Keg	5	2	3	1	2	8	160
[SUBKEGIATAN] Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pameran Dagang Nasional yang diikuti	Keg	3	2	1	0	1	4	133.33
[SUBKEGIATAN] Pameran Dagang Lokal	Jumlah pameran dagang lokal yang diikuti / dilaksanakan	Keg	1	N/A	1	1	0	2	200
[SUBKEGIATAN] Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah calon eksportir / importir yang terfasilitasi di Kabupaten Banyumas	pelaku usaha	30	N/A	30	0	4	34	113.33
	Jumlah Gula Kelapa Terekspor	Ton	14000	386.63	247.11	643.2	11218.96	12495.9	89.26
[PROGRAM] PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	%	99.51	40.19	72.56	125.63	170.49	170.49	171.33
[KEGIATAN] Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pelayanan tera / tera ulang dan Pengawasan yang dilaksanakan	Keg	27	18	8	2	20	48	177.78
[SUBKEGIATAN] Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	Unit	25100	10088	18212	31533	42794	42794	170.49
[SUBKEGIATAN]	Jumlah UTTP yang diawasi	Unit	25100	8245	18212	31533	42794	42794	170.49
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	%	83	63.16	84.4	87.77	89.94	89.94	108.36
[PROGRAM] PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usaha yang dipromosikan	%	0.7	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	160
[KEGIATAN] Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah kegiatan Promosi Produk Dalam Negeri yang dilaksanakan	Keg	12	1	3	0	14	18	150
[SUBKEGIATAN] Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang diikutkan dalam promosi dagang dan industri	pelaku usaha	50	15	32	0	109	156	312
[PROGRAM]	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100
[KEGIATAN] X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	3	2	0	1	0	3	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	2	1	0	1	0	2	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	1	0	0	0	1	100
[KEGIATAN] X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	2	2	2	2	2	2	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	184	191	188	184	183	183	99.46
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	25	23	23	24	24	24	96
[KEGIATAN] X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan baik	Bulan	12	3	3	3	3	12	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jasa Jaminan Barang Milik Daerah yang terbayarkan	Kali	1	N/A	N/A	1	0	1	100

Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target		Realisasi Kiner	ja Pada Triwulan		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian kineria Tahun 2022
				1	2	3	4	Kinerja Tahun 2022	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=9/4*100
[KEGIATAN] X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	6	6	6	6	6	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	15	10	10	15	15	15	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	50	26	26	50	50	50	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	25	18	18	25	37	37	148
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	3	3	3	3	12	100
[SUBKEGIATAN]	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	1500		419			1549	103.27
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	25000	2630	6986	15225	16200	41041	164.16
[SUBKEGIATAN]	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang	Kali	400	48	86	64	277	475	118.75
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dilaksanakan			ļ					
[KEGIATAN] X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	3	0	0	2	2 3	3	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	5	N/A	N/A	7	0	7	140
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	13	N/A	0	12	39	51	392.31
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	13	N/A	N/A	C	13	13	100
(KEGIATAN) X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	3	2	2	3	3	3	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	3	3	3	3	12	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Jenis	2	N/A	N/A		2	2	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	229	239	239	237	236	236	103.06
[KEGIATAN] X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	5	1	2	5	5	5	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	40	20	20	40	41	41	102.5
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	15	N/A	N/A	12	15	15	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	40	N/A	18	20	40	40	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	3	N/A	0	3	3	3	100
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	50	N/A	13	42	2 50	50	100
SUB OPD : UPTD PASAR WILAYAH BANYUMAS BARAT									
[PROGRAM]	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100

Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Pada Triwulan zet				Realisasi Capaian	Tingkat Capaian kinerja Tahun 2022
	,			1	2	3	4	Kinerja Tahun 2022	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=9/4*100
[KEGIATAN]	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	5	5	5	5	5	5	100
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah									
[SUBKEGIATAN]	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	13	8	8	12	17	17	130.77
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan									
Kantor									
[SUBKEGIATAN]	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	28	12	12	17	36	36	128.57
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
[SUBKEGIATAN]	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	13	13	13	13	13	13	100
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							_		100
[SUBKEGIATAN]	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	3	3	3	3	12	100
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor [SUBKEGIATAN]	I was late and a second	lhr	14500	2759	3687	969	9797	17212	118.7
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia	IDI	14500	2/59	3687	969	9/9/	1/212	118.7
[KEGIATAN]	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	2	0	0	0	2	2	100
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumian barang milik daeran yang tersedia	Jenis	2	U	U	U	2	2	100
Nacrah									
[SUBKEGIATAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	2	N/A	0	0	2	2	100
X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Julilan Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Offic	2	N/A	o .	o a	2	2	100
A.A.O.I.Z.O7.00 Feligadaan Felialatan dan Mesin Lanniya									
[CUDYFOLATAN]		11.3		21/2				4	100
[SUBKEGIATAN]	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	Unit	1	N/A	U	U	1	1	100
X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	lainnya yang tersedia								
KEGIATAN	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	1	1	1	1	1	1	100
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Julilan jasa perayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	1	1	1	1	1	1	100
[SUBKEGIATAN]	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	2	2	2	2	12	100
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Julilari langgarian surat kabar, telepon, internet, listrik, dari ali yang dikelola	bulan	12	3	3	3	3	12	100
The state of the s									
[KEGIATAN]	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	4	2	2	5	4	4	100
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan									
Pemerintahan Daerah									
[SUBKEGIATAN]	Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	2	N/A	0	2	0	2	100
X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel									
[SUBKEGIATAN]	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	37	23	27	31	70	70	189.19
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
[SUBKEGIATAN]	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	5	N/A	0	3	5	5	100
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan									
Lainnya									
[SUBKEGIATAN]	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	Unit	8	5	8	8	8	8	100
X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	lainnya yang dipelihara								
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
UPTD PASAR WILAYAH BANYUMAS TIMUR									
[PROGRAM]	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100
[KEGIATAN]	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	6	6	6	6	6	100
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.2	1	1		ļ		
[SUBKEGIATAN]	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	10	10	10	10	10	10	100
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan									
Kantor			40	20	20	40	40	10	100
[SUBKEGIATAN]	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	48	20	20	48	48	48	100
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	lumber and the second s	lant.	25	25	25	25	25	25	100
[SUBKEGIATAN]	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	25	25	25	25	25	25	100
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<u> </u>	1	1	1	1	<u> </u>	1	l	1

Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian	Tingkat Capaian kinerja Tahun 2022
			. 0	1	2	3	4	Kinerja Tahun 2022	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=9/4*100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	3	3	3	3	12	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	14	6	2	6	0	14	100
	Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	9000	1980	1720	1858	2480	8038	89.31
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	15	3	3	2	7	15	100
[KEGIATAN] X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	3	2	3	3	3	3	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	1	1	0	0	0	1	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	2	2	1	0	1	4	200
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	1	0	1	0	0	1	100
[KEGIATAN] X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	1	1	1	1	1	1	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	3	3	3	3	12	100
[KEGIATAN] X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	4	N/A	3	3	4	4	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	1	1	0	0	0	1	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	16	5	5	6	16	16	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	7	N/A	2	4	7	7	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	6	N/A	3	3	8	8	133.33
UPTD PASAR WILAYAH PURWOKERTO I					1		1		
[PROGRAM] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100
[KEGIATAN] X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	5	5	5	5	5	5	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	20	5	5	15	20	20	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	37	11	16	27	35	35	94.59
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	20	5	10	15	20	20	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	3	3	3	3	12	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	6	3	0	0	3	6	100

Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target		Realisasi Kine	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian kineria Tahun 2022		
	manaco mierja Jasaran / rrogram / negratan / Sub negratan		rarget	1	2	3	4	Kinerja Tahun 2022	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=9/4*100
	Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	5000	1250	1134	2014	598	4996	99.92
[KEGIATAN] X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	1	0	0	0	1	1	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Jenis	1	0	0	0	1	1	100
[KEGIATAN] X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	2	2	2	2	2	2	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	3	3	3	3	12	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	20	9	15	18	20	20	100
[KEGIATAN] X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	3	3	3	3	3	3	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	23	6	6	13	23	23	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	7	2	3	4	7	7	100
[SUBKEGIATAN]X .XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	6	2	2	4	6	6	100
UPTD PASAR WILAYAH PURWOKERTO II									
[PROGRAM] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
[KEGIATAN] X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	5	5	5	5	5	5	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	8	5	7	7	8	8	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	37	12	22	32	37	37	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	16	7	12	12	16	16	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	3	3	3	3	12	100
[SUBKEGIATAN]	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	12	N/A	0	12	0	12	100
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	15000	1000	2000	12000	0	15000	100
[KEGIATAN] X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	2	0	0	1	2	2	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	1	N/A	0	3	1	4	400
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	15	N/A	0	0	t	15	100

Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target		Realisasi Kine	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian kinerja Tahun 2022		
				1	2	3	4	Kinerja Tahun 2022	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=9/4*100
[KEGIATAN] X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	1	1	1	1	1	1	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	3	3	3	3	12	100
[KEGIATAN] X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	3	3	3	3	3	3	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	3	3	9	10	10	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	7	4	4	7	7	7	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	1	1	1	1	1	1	100